

STRUKTUR INFORMASI HUBUNGAN BILATERAL

I. Judul

Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia

II. Pembukaan

Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki nilai strategis yang kuat. Sebagai negara tetangga yang serumpun, hubungan Indonesia dan Malaysia telah terjalin lama karena kedekatan historis dan budaya yang sangat erat. Hubungan bilateral kedua negara berlangsung dengan baik dalam semua tataran. Sebagai sesama pendiri ASEAN, hubungan keduanya pun memiliki arti penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan.

Kedekatan geografis, demografis dan budaya juga menjadi faktor utama yang mempererat hubungan politik, pertahanan, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia dan Malaysia berada di posisi geopolitik yang strategis. Selat Malaka yang menyatukan kedua negara merupakan salah satu rute perdagangan utama dunia dimana 60% perdagangan maritim melalui selat ini. ASEAN's Outlook on Indo Pacific semakin menegaskan posisi strategis Indonesia dan Malaysia serta negara-negara di kawasan.

Malaysia dan Indonesia memiliki mekanisme bilateral yang mencakup berbagai level strategis yakni mulai dari pertemuan tahunan tingkat Kepala Pemerintahan (*Annual Consultation*), tingkat Menteri Luar Negeri (*Joint Commission for Bilateral Cooperation / JCBC*) hingga pertemuan yang melibatkan level pemerintahan lainnya dari berbagai sektor. Di bawah JCBC, terdapat 4 (empat) working group yaitu: 1) *Working Group on Political, Security and Border Issues*; 2) *Working Group on Economic Issues*; 3) *Working Group on Socio-Cultural Issues*; 4) *Working Group on Investment*.

III. Sejarah Hubungan Diplomatik

Pembukaan hubungan diplomatik RI-Malaysia dimulai pada 31 Agustus 1957. Kedua negara senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik dan berada dalam kondisi *stable-tension*. Pasang-surut hubungan kedua negara berkisar pada 3 persoalan utama, yaitu permasalahan perbatasan, tenaga kerja Indonesia (TKI), dan budaya. Walaupun demikian, Indonesia dan Malaysia mampu mengelola berbagai persoalan yang muncul melalui berbagai mekanisme bilateral yang telah berjalan dengan baik.

Pertemuan Konsultasi Tahunan ke-13 (*Annual Consultation*) tingkat Kepala Negara diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2025 di Jakarta. Pertemuan Konsultasi Tahunan sebelumnya diselenggarakan di Kuching, Malaysia pada tahun 2017.

IV. Kunjungan Tingkat Tinggi

- a. Kunjungan Kerja PM Malaysia, YM Anwar Ibrahim ke Indonesia dalam rangka Annual Consultation ke-13 dengan Presiden Republik Indonesia, 28-29 Juli 2025.
- b. Kunjungan Resmi PM Malaysia, YM Anwar Ibrahim ke Indonesia dalam rangka bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, 27 Juni 2025
- c. KTT ASEAN ke-46, 26-27 Mei 2025, Kuala Lumpur.
- d. Kunjungan Silaturahmi Presiden RI ke Kuala Lumpur, 6 April 2025.
- e. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Yang di-Pertuan Agong XVII, Sultan Ibrahim dan PM Malaysia, YM Anwar Ibrahim, di Peterana Diraja, Istana Negara pada Senin, 27 Januari 2025.
- f. Kunjungan Pribadi dan Santap Siang Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada PM Malaysia, YM Dato' Seri Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur pada 9 Januari 2025.
- g. Kunjungan resmi Menhan RI, Prabowo Subianto, calon Presiden RI terpilih, kepada Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, di Istana Negara, pada Sabtu, 7 September 2024.
- h. Kunjungan Menhan RI, Prabowo Subianto, calon Presiden RI terpilih, kepada PM Malaysia, YM Dato' Seri Anwar Ibrahim, di Seri Perdana, Putrajaya, pada Sabtu, 7 September 2024.
- i. Kunjungan hormat Menhan RI, Prabowo Subianto, calon Presiden RI terpilih, kepada PM Malaysia, YM Dato' Seri Anwar Ibrahim, Gedung Perdana Putra, Putrajaya, Kamis, 4 April 2024.
- j. Kunjungan PM Malaysia, YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim, dalam rangka KTT ASEAN ke-43 dan Rangkaian KTT ASEAN dengan Mitra Wicara, Jakarta, 5-7 September 2023.
- k. Kunjungan Presiden RI, Bapak Joko Widodo, beserta istri ke Malaysia, 7-8 Juni 2023 dalam rangka kunjungan kerja balasan, Seri Perdana, Malaysia.
- l. Kunjungan PM Malaysia, YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim, dalam rangka KTT ASEAN ke-42, 9-10 Mei 2023. Pertemuan bilateral di *sideline* KTT ASEAN ke-42, 9 Mei 2023.
- m. Kunjungan PM Malaysia, YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim, kunjungan resmi, Istana Bogor 8-9 Januari 2023

- n. Kunjungan PM Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia untuk kedua-kalinya pada 1 April 2022
- o. Kunjungan Resmi PM Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia yang pertama pada 9 – 11 November 2021
- p. Kunjungan PM Muhyiddin Yassin ke Indonesia dalam rangka menghadiri *ASEAN Leaders' Meeting* pada 24 April 2021
- q. Kunjungan Resmi PM Muhyiddin Yassin ke Indonesia yang pertama pada 4-5 Februari 2021
- r. Kunjungan PM Mahathir ke Indonesia dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2020 – 2024 pada 20 Oktober 2019
- s. Kunjungan Kenegaraan Yang Dipertuan Agong XVI Malaysia ke Indonesia, 26 – 28 Agustus 2019
- t. Kunjungan Resmi Presiden RI ke Malaysia, 8-9 Agustus 2019

V. Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia

A. Kerjasama Bidang Politik

Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga dengan garis perbatasan yang luas baik di darat maupun laut, memiliki potensi hubungan politik yang signifikan di bidang perbatasan. Salah satu potensi terbesar dalam hubungan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah penyelesaian perbatasan darat di segmen Pulau Sebatik dan segmen Sinapad-Sesai, serta perbatasan di area intertidal di Pulau Sebatik, yang mencakup area antara East Pillar hingga Low Water Line. Komitmen ini menunjukkan keseriusan kedua negara untuk mengatasi isu-isu perbatasan yang telah berlangsung lama.

Isu lain yang masih perlu penyelesaian adalah proses ratifikasi Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA). Proses harmonisasi dan finalisasi draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk ratifikasi BTA telah mencapai tahap program penyusunan, dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Penyelesaian ratifikasi BTA dan BCA akan memberikan kepastian hukum bagi perdagangan lintas batas dan pergerakan penduduk di kawasan perbatasan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Selain itu, kedua negara juga telah sepakat untuk melanjutkan perundingan batas maritim di segmen lainnya termasuk area intertidal, setelah penandatanganan perjanjian perbatasan laut di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Langkah- langkah ini mencerminkan pendekatan konstruktif yang diambil kedua negara untuk menyelesaikan

masalah perbatasan, termasuk penggunaan mekanisme "*political commitment*" jika perundingan mengalami kebuntuan.

B. Kerjasama Bidang Ekonomi

Indonesia dan Malaysia berada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi regional dan global. Pada tahun 2024, Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan kontribusi GDP global mencapai 1,4% dan terbesar pertama di kawasan ASEAN dengan kontribusi GDP sebesar 36,72%. Sementara itu, GDP Malaysia merupakan terbesar ke-4 di kawasan atau berkontribusi 11,24% terhadap total GDP ASEAN setelah Indonesia (36,72%), Singapura (12,89%), dan Vietnam (11,28%).

Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama regional dalam bidang ekonomi diantaranya melalui skema *Free Trade Area (FTA)* dengan sesama negara anggota ASEAN baik dalam kerangka barang, jasa maupun investasi. Pemerintah RI termasuk Perwakilan RI di Malaysia diharapkan memberikan dukungan kepada UMKM Indonesia diantaranya dengan mendorong dan memfasilitasi peningkatan inovasi dan kualitas agar mampu menembus pasar di kawasan Asia Tenggara termasuk pasar Malaysia.

Guna meningkatkan volume perdagangan dua arah, Indonesia tetap memiliki tantangan yakni kesamaan karakteristik produk yang menyebabkan persaingan tinggi sebagai mitra dagang utama Malaysia. Diversifikasi produk Indonesia merupakan strategi yang dapat terus dilakukan untuk menembus pasar ekspor Malaysia dan sekaligus juga menjadi peluang diversifikasi impor bagi Indonesia.

Terkait sektor ekonomi lainnya, Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan prioritas utama pembangunan kedepannya yang meliputi konektivitas, ekonomi hijau dan energi terbarukan. sebagai contoh, kesepakatan Indonesia dan Malaysia untuk pembangunan konektivitas laut antara Johor dan Batam diyakini akan mendukung pembangunan ekonomi di kedua kawasan.

Terkait penguatan kerjasama investasi, Dalam kunjungan PM Anwar Ibrahim pada 9 Januari 2023, telah diserahkan sejumlah *Letter of Intent (LoI)* sektor

swasta Malaysia kepada Otoritas IKN yang meliputi proyek properti, listrik, otomotif, *building material*, farmasi dan layanan kesehatan, keuangan, dan *smart city technology*.

Di bidang pariwisata, Indonesia dan Malaysia telah sama-sama berkontribusi pada jumlah wisatawan mancanegara di wilayahnya. Kemampuan Malaysia untuk menarik wisatawan hingga 20 juta orang per tahun atau kedua terbesar setelah Thailand di kawasan, menawarkan peluang kerja sama bagi Indonesia untuk saling mempromosikan sektor pariwisata di wilayahnya kepada wisatawan asal negara ketiga, yang sejalan dengan *ASEAN Tourism Marketing Strategy for 2021-2025*.

Bidang ekonomi lainnya yang menjadi fokus dalam penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia meliputi isu perdagangan perbatasan dan lintas batas untuk memperkuat koridor ekonomi di wilayah perbatasan; sertifikasi halal; energi; kesehatan; industri kelapa sawit; kesehatan; konektivitas pembayaran berbasis teknologi digital; dan kerja sama ekonomi dalam kerangka IMT-GT dan BIMP-EAGA khususnya konektivitas dan interkoneksi energi hijau.

Terkait kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagalistrikan, Indonesia dan Malaysia sedang menjajaki peluang kerja sama baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Dalam kerangka bilateral, terdapat 2 (dua) proyek interkoneksi yaitu Malaysia- Sumatera dan Kalimantan-Sabah. Kedua negara juga terlibat dalam kerangka proyek integrasi jaringan listrik dan perdagangan tenaga listrik lintas batas antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina / *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines Power Integration Project (BIMP-PIP)*.

C. Kerjasama Bidang Sosial Budaya

Sejarah panjang, kesamaan budaya dan warisan sejarah sebagai negara serumpun menghadirkan berbagai tantangan dan juga peluang. Secara keseluruhan, hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan interaksi yang dinamis, di mana rasa persaudaraan sering kali diuji oleh perbedaan persepsi dan kepentingan, namun tetap diupayakan untuk dipererat melalui dialog dan kerjasama.

Dalam hal ini, media memainkan peran besar untuk turut membangun hubungan kedua negara yang berlandaskan pada pemahaman dan saling menghormati antar masyarakat. Pemberitaan yang berimbang oleh media kedua negara diharapkan mampu menyajikan informasi yang sarat akan pesan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi demi pencapaian kesuksesan bersama.

Penyelenggaraan Diplomasi Sosial Budaya oleh Perwakilan RI di Malaysia bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman, melainkan juga citra positif Indonesia di Malaysia, memperkuat persahabatan dan *people-to-people contact* di kedua negara yakni melalui pertukaran seni dan budaya, pertukaran informasi, kerja sama sosial dan kesehatan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada WNI.

Shared Cultural Heritage

Permasalahan yang kerap menimbulkan friksi hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia adalah mengenai masalah warisan kebudayaan. Salah satunya mengenai Isu Kebaya, dimana Malaysia menawarkan *Joint Submission* Warisan Budaya Tak Benda bersama dengan Indonesia kepada UNESCO pada November 2021. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia belum akan memberikan tanggapan. Rencana *Joint Submission* Kebaya tidak hanya diusulkan secara bilateral oleh Malaysia, namun pada tahun 2023, sempat ada rencana pengajuan *Joint Submission* Kebaya bersama – sama dengan Malaysia, Brunei, Singapura dan Thailand untuk inskripsi tahun 2024. Hingga saat ini, rencana tersebut belum terdapat perkembangan.

D. Kerjasama Bidang Pendidikan

Pada tahun 2023, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU Kerja Sama di Bidang Pendidikan yang salah satunya merupakan upaya untuk memperoleh legitimasi atas keberadaan Sanggar Bimbingan / CLC di Malaysia, khususnya di Sarawak dan kawasan di luar ladang di Sabah serta Semenanjung. Hal ini sebagai wujud kesepakatan fasilitas akses pendidikan bagi warga negara masing-masing di wilayah akreditasi.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia dan Malaysia belum membentuk

Joint Working Group on Education sesuai dengan mandat MoU tersebut. Selain itu, Indonesia dan Malaysia perlu untuk menuntaskan pembahasan kerjasama bidang pendidikan tinggi dimana salah satunya memuat komponen tambahan yaitu fasilitasi kemudahan izin tinggal bagi mahasiswa Pendidikan Tinggi.

VI. Kerjasama Konsuler dan Pelindungan WNI

Pasca pandemi Covid-19, terjadi tren peningkatan signifikan dalam penempatan PMI di Malaysia. Pada tahun 2022, penempatan PMI mencapai 43.163 PMI dan terus meningkat pada tahun 2023 dengan total 72.260 PMI, terdiri dari 64.860 pekerja formal dan 7.400 pekerja informal. Berbeda dengan Hong Kong di mana 98% dari 65 ribu TKI bekerja di sektor informal, dan Taiwan yang setengah dari PMI-nya berada di sektor formal, penempatan di Malaysia lebih terdiversifikasi antara sektor formal dan informal.

Dari segi kontribusi ekonomi, Malaysia berperan penting bagi Indonesia melalui remitansi. Sebanyak 32% dari total remitansi PMI yang mencapai USD 4,9 miliar, berasal dari Malaysia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia perlu dijaga karena kedua negara saling membutuhkan.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, termasuk pembaruan MoU tentang Pekerja Migran tahun 2004, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Pembaruan ini harus mencakup penyesuaian skema penempatan, struktur biaya, dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, masalah lain yang memerlukan perhatian adalah kondisi penahanan PMI di depo imigrasi Malaysia, di mana banyak dari mereka ditahan dalam kondisi tidak layak. Melalui komitmen *burden sharing*, setiap tahun Pemerintah Indonesia selalu menyelenggarakan program percepatan pemulangan kelompok rentan dari berbagai depo tahanan imigrasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Di tahun 2024, setidaknya 435 WNI yang terdiri dari ibu dan anak, lansia, ibu hamil dan WNI yang sakit telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan TPPO

Indonesia dan Malaysia telah memiliki MoU on Transnational Organized Crime. Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan peninjauan kerja sama pemberantasan kerja sama TPPO yang lebih teknis dan mengedepankan perlindungan terhadap korban TPPO. *Draft* MoU disusun oleh Dit. PWNI Kementerian Luar Negeri dan telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk dimintakan tanggapan.

Kerja Sama Notifikasi Kekonsuleran (Consular Notification)

Hingga saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki perjanjian di bidang kekonsuleran walau kepentingan Indonesia dan Malaysia di isu ini sangat tinggi. Kerja sama ini dipandang penting untuk memastikan kecepatan respon perlindungan dalam setiap kasus yang menimpa warga kedua negara.

VII. Forum dan Mekanisme Kelembagaan

- Kedua negara memiliki mekanisme pertemuan bilateral yakni *Annual Consultation* (tingkat Kepala Pemerintahan). *Annual Consultation* terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025 di Jakarta, Indonesia (*13th Annual Consultation*).
- *Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC* (tingkat Menteri Luar Negeri). JCBC ke-16 diselenggarakan pada 20-21 November 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di bawah JCBC, terdapat 4 *working group* yaitu: 1) *Working Group on Political, Security and Border Issues*; 2) *Working Group on Economic Issues*; 3) *Working Group on Socio-Cultural Issues*; 4) *Working Group on Investment*.
- *Joint Trade and Investment Committee*
- *Joint Ministerial Committee Meeting on Commodities*
- *High Level Committee (HLC) Malindo* (Panglima TNI)
- *General Border Committee* (GBC) pada tingkat Menteri Pertahanan
- *Sosek Malindo tk. SOM*
- Berbagai *Joint Working Group* teknis lainnya

VIII. Highlight Kerja Sama Bilateral yang Mendukung Program Asta Cita

Terdapat sejumlah program prioritas yang mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Kerjasama bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan (Asta Cita 2).**
Indonesia dan Malaysia memiliki potensi hubungan politik yang signifikan di bidang perbatasan. Salah satu potensi terbesar dalam hubungan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah penyelesaian perbatasan darat di segmen Pulau Sebatik dan segmen Sinapad-Sesai, serta perbatasan di area intertidal di Pulau Sebatik, yang mencakup area antara East Pillar hingga Low Water Line. Komitmen ini menunjukkan keseriusan kedua negara untuk mengatasi isu-isu perbatasan yang telah berlangsung lama.
2. Penyelesaian proses ratifikasi Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA). Proses harmonisasi dan finalisasi draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk ratifikasi BTA telah mencapai tahap program penyusunan, dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Penyelesaian ratifikasi BTA dan BCA akan memberikan kepastian hukum bagi perdagangan lintas batas dan pergerakan penduduk di kawasan perbatasan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempererat hubungan bilateral kedua negara.
3. Kedua negara juga telah sepakat untuk melanjutkan perundingan batas maritim di segmen lainnya termasuk area intertidal, setelah penandatanganan perjanjian perbatasan laut di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Langkah- langkah ini mencerminkan pendekatan konstruktif yang diambil kedua negara untuk menyelesaikan masalah perbatasan, termasuk penggunaan mekanisme "*political commitment*" jika perundingan mengalami kebuntuan.
4. Malaysia merupakan salah satu dari sedikit negara dimana Indonesia memiliki mekanisme bilateral yang mencakup berbagai level strategis yakni mulai dari pertemuan tahunan tingkat Kepala Pemerintahan (*Annual Consultation*), tingkat Menteri Luar Negeri (*Joint Commission for Bilateral Cooperation / JCBC*) hingga pertemuan yang melibatkan level pemerintahan lainnya dari berbagai sektor. Di bawah JCBC, terdapat 4 (empat) working group yaitu: 1) *Working Group on Political, Security and Border Issues*; 2) *Working Group on Economic Issues*; 3) *Working Group on Socio-Cultural Issues*; 4) *Working Group on Investment*.

5. **Kerjasama Bidang Ekonomi (Asta Cita 2, 3 dan 5).** Indonesia dan Malaysia berada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi regional dan global. Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama regional dalam bidang ekonomi diantaranya melalui skema *Free Trade Area (FTA)* dengan sesama negara anggota ASEAN baik dalam kerangka barang, jasa maupun investasi. Pemerintah RI termasuk Perwakilan RI di Malaysia diharapkan memberikan dukungan kepada UMKM Indonesia diantaranya dengan mendorong dan memfasilitasi peningkatan inovasi dan kualitas agar mampu menembus pasar di kawasan Asia Tenggara termasuk pasar malaysia.
6. Terkait penguatan kerjasama investasi, Dalam kunjungan PM Anwar Ibrahim pada 9 Januari 2023, telah diserahkan sejumlah *Letter of Intent (LoI)* sektor swasta Malaysia kepada Otoritas IKN yang meliputi proyek properti, listrik, otomotif, *building material*, farmasi dan layanan kesehatan, keuangan, dan *smart city technology*.
7. Bidang ekonomi lainnya yang menjadi fokus dalam penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia meliputi isu perdagangan perbatasan dan lintas batas untuk memperkuat koridor ekonomi di wilayah perbatasan; sertifikasi halal; energi; kesehatan; industri kelapa sawit; kesehatan; konektivitas pembayaran berbasis teknologi digital; dan kerja sama ekonomi dalam kerangka IMT-GT dan BIMP-EAGA khususnya konektivitas dan interkoneksi energi hijau.
8. Terkait kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagalistrikan, Indonesia dan Malaysia sedang menjajaki peluang kerja sama baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Dalam kerangka bilateral, terdapat 2 (dua) proyek interkoneksi yaitu Malaysia- Sumatera dan Kalimantan-Sabah. Kedua negara juga terlibat dalam kerangka proyek integrasi jaringan listrik dan perdagangan tenaga listrik lintas batas antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina / *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines Power Integration Project (BIMP-PIP)*.

9. Mendorong kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia melalui kerja sama pariwisata, industri kreatif dan akses pasar UMKM. Malaysia merupakan negara asal wisatawan mancanegara terbesar untuk Indonesia. Malaysia juga menempati urutan pertama negara dengan jumlah turis mancanegara terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2023. Hal ini bisa dikapitalisasi untuk meningkatkan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui kerjasama paket wisata. Industri kreatif dan UMKM akan menjadi faktor pendorong sekaligus yang akan mendapatkan benefit dari peningkatan arus wisatawan.

10. Mendorong konektivitas. Konektivitas merupakan faktor pemampu untuk biaya logistik yang rendah dan interaksi people-to-people yang semakin intensif. Konektivitas perlu dibangun untuk menghubungkan berbagai daerah di Indonesia dengan Malaysia, terutama di daerah yang berbatasan langsung dan daerah-daerah yang menjadi tujuan pariwisata.

11. **Kerjasama Bidang Pendidikan (Asta Cita 4).** Pada tahun 2023, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU Kerja Sama di Bidang Pendidikan yang salah satunya merupakan upaya untuk memperoleh legitimasi atas keberadaan Sanggar Bimbingan / CLC di Malaysia, khususnya di Sarawak dan kawasan di luar ladang di Sabah serta Semenanjung. Hal ini sebagai wujud kesepakatan fasilitas akses pendidikan bagi warga negara masing-masing di wilayah akreditasi. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia dan Malaysia belum membentuk *Joint Working Group on Education* sesuai dengan mandat MoU tersebut. Selain itu, Indonesia dan Malaysia perlu untuk menuntaskan pembahasan kerjasama bidang pendidikan tinggi dimana salah satunya memuat komponen tambahan yaitu fasilitasi kemudahan izin tinggal bagi mahasiswa Pendidikan Tinggi.

12. **Kerjasama Konsuler dan Pelindungan WNI (Asta Cita 1).** Pasca pandemi Covid-19, terjadi tren peningkatan signifikan dalam penempatan PMI di Malaysia. Pada tahun 2022, penempatan PMI mencapai 43.163 PMI dan terus meningkat pada tahun 2023 dengan total 72.260 PMI, terdiri dari 64.860 pekerja formal dan 7.400 pekerja informal. Berbeda dengan Hong Kong di mana 98% dari 65 ribu TKI bekerja di sektor informal, dan Taiwan yang setengah dari PMI-nya berada di sektor formal, penempatan di Malaysia lebih terdiversifikasi antara sektor formal dan informal.

13. Dari segi kontribusi ekonomi, Malaysia berperan penting bagi Indonesia melalui remitansi. Sebanyak 32% dari total remitansi PMI yang mencapai USD 4,9 miliar, berasal dari Malaysia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia perlu dijaga karena kedua negara saling membutuhkan.
14. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, termasuk pembaruan MoU tentang Pekerja Migran tahun 2004, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Pembaruan ini harus mencakup penyesuaian skema penempatan, struktur biaya, dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
15. Selain itu, masalah lain yang memerlukan perhatian adalah kondisi penahanan PMI di depo imigrasi Malaysia, di mana banyak dari mereka ditahan dalam kondisi tidak layak. Melalui komitmen burden sharing, setiap tahun Pemerintah Indonesia selalu menyelenggarakan program percepatan pemulangan kelompok rentan dari berbagai depo tahanan imigrasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Di tahun 2024, setidaknya 435 WNI yang terdiri dari ibu dan anak, lansia, ibu hamil dan WNI yang sakit telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
16. **Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan TPPO (Asta Cita 1 dan 7).** Indonesia dan Malaysia telah memiliki MoU on Transnational Organized Crime. Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan peninjauan kerja sama pemberantasan kerja sama TPPO yang lebih teknis dan mengedepankan perlindungan terhadap korban TPPO. *Draft* MoU disusun oleh Dit. PWNI Kementerian Luar Negeri dan telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk dimintakan tanggapan.
17. **Kerja Sama Notifikasi Kekonsuleran (Consular Notification).** Hingga saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki perjanjian di bidang konsuleran walau kepentingan Indonesia dan Malaysia di isu ini sangat tinggi. Kerja sama ini dipandang penting untuk memastikan kecepatan respon perlindungan dalam setiap kasus yang menimpa warga kedua negara.

Dalam lima tahun terakhir, kedua negara telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman (MoU) sebagai *concrete deliverables* dari pertemuan para pemimpin negara yang memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor yakni meliputi kerja sama penempatan dan perlindungan PMI; promosi investasi; pendidikan; sertifikasi halal; perdagangan dan lintas batas. Implementasi MoU akan terus didorong guna memberikan dampak dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

IX. Penutup

Kantor Perwakilan Malaysia di Indonesia

- 1. Alamat Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta:**
Jl. H. R. Rasuna Said No.1 Kav.X/6, RT.1/RW.3, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Phone: (021) 5224947 4947 / +6281380813036
Email mwjakarta@kln.gov.my.
- 2. Alamat Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Sumatra Utara:**
Jl. Pangeran Diponegoro No.43, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

Phone: (061) 4531342
https://www.kln.gov.my/web/idn_medan
- 3. Alamat Konsulat Jenderal Malaysia di Pontianak, Kalimantan Barat:**
Jl. Perdana No.001, Parit Tokaya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Phone: (0561) 736061
- 4. Alamat Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru, Riau:**
Jl. Jend. Sudirman Bundaran Simpang Tiga, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288

Phone: (0761) 856166
https://www.kln.gov.my/web/idn_pekanbaru
- 5. Alamat Konsulat Jenderal Malaysia di Denpasar, Bali:**
The Stones Entertainment Center, Alam Kulkul Boutique Resort, Jl. Pantai Kuta, Legian, Bali, 80030, Legian, Kuta, Badung Regency, Bali

Phone: (0361) 752520

Kantor Perwakilan Indonesia di Malaysia

- 1. Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia:**
No. 233, Jln. Tun Razak Imbi, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.
Tlp: +60 3-2116 4016

Website: <https://kemlu.go.id/kualalumpur/en/>

2. **Alamat Konsulat Jenderal Indonesia di Penang, Malaysia:**
467, Jalan Burma, 10350 George Town, Pulau Pinang, Malaysia
Phone: +60 4-227 4686
Website: penang.kjri@kemlu.go.id

3. **Alamat Konsulat Jenderal Indonesia di Johor Bahru, Malaysia**
46, Jalan Taat, Bandar Johor Bahru, 80100 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, Malaysia
Phone: +60 7-227 4188
Website: johorbahru.kjri@kemlu.go.id

4. **Alamat Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching-Sarawak, Malaysia**
Lot 86, Section 53, Menara Maa, Jalan Central Timur, 93100 Kuching, Sarawak, Malaysia
Phone: +60 82-460 734
Website: Kuching.kjri@kemlu.go.id

5. **Alamat Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia**
Lorong Kemajuan, Karamunsing, 88817 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Phone: +60 88-219 110

6. **Alamat Konsulat Jenderal Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia**
TB 690-693 (LOT 5-8) Lorong Megah Jaya, 10, Jalan Tikau, KM 8, 91000. Tawau, Sabah, Malaysia.
Phone: +60 89-772052

